

LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara Evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes

Hari/Tanggal	Jumat, 8 Mei 2026
Tempat	Kantor BPKAD Kabupaten Brebes, Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Narasumber	: 1. Ibu Wenny Arifia P, SE
	2. Ibu Rianti Cahya Dewi, SE, M.Akun
	3. Bapak Reki Anjar Kumoro, S.Kom

1. Indikator *Performance* (Kinerja Sistem)

- a. Bagaimana kinerja, kecepatan, dan kestabilan sistem SIPD saat digunakan dalam pemrosesan data akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Brebes, apakah sudah memenuhi atau belum memenuhi dalam aspek kinerja sistem?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyatakan, “SIPD telah mendukung sekitar 90% proses pelaporan keuangan, tetapi belum memenuhi karena sistem sering melambat saat trafik tinggi.” Narasumber kedua, “Belum memenuhi. Karena pemrosesan bergantung pada jaringan dan server pusat serta perubahan kode rekening dari Kemendagri sering menghambat entri dan posting jurnal.” Narasumber ketiga, “Belum memenuhi. Karena beberapa menu belum tersedia sehingga sebagian data masih harus diolah secara manual menggunakan *Excel*.”

- b. Apa hambatan teknis utama yang mempengaruhi waktu penyelesaian pekerjaan pada SIPD dan bagaimana upaya mengatasinya?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, “hambatan utama adalah ketergantungan pada pusat dan keterlambatan data dari bidang Penganggaran dan Penatausahaan, sehingga laporan tidak dapat diproses jika data belum valid.” Narasumber kedua menambahkan, “*server down* sering menghambat posting jurnal dan kendala dilaporkan ke *helpdesk* pusat.” Narasumber ketiga menyatakan, “*output* sistem yang tidak sinkron mengharuskan verifikasi silang secara manual agar pelaporan selesai tepat waktu.”

2. Indikator *Information* (Kualitas Informasi)

- a. Sejauh mana informasi dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIPD memenuhi kriteria akurasi, kelengkapan, dan relevansi kebutuhan daerah?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, “Belum memenuhi. Laporan realisasi umumnya sudah tersaji dengan baik melalui SIPD, tetapi laporan seperti LO masih belum lengkap sehingga memerlukan penyesuaian data.” Narasumber kedua menambahkan, “Belum memenuhi. Karena rincian transaksi jurnal khususnya uraian pencairan SP2D/STS, terkadang kurang lengkap sehingga petugas perlu memeriksa kembali dokumen sumber untuk memastikan pencatatan.” Narasumber ketiga menjelaskan, “Belum memenuhi. Karena informasi sistem belum sepenuhnya siap saji. Perbedaan format komponen Pembiayaan antara menu evaluasi gubernur dan laporan keuangan akhir mengharuskan validasi dan pencocokan angka secara manual di *Microsoft Excel*.”

- b. Bagaimanakah dampak perubahan kode rekening atau aturan dari pemerintah pusat terhadap konsistensi data laporan keuangan daerah?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, “Perubahan kode rekening di tengah tahun mengganggu konsistensi informasi karena realisasi sebelumnya dapat bergeser atau tidak terpetakan dengan tepat, sehingga memerlukan rekonsiliasi ulang.” Narasumber kedua menjelaskan, “Setiap penambahan akun dari Kemendagri mengharuskan kami memeriksa kembali transaksi belanja pegawai, barang/jasa, dan modal serta menelusuri nomor SP2D dan STS jika terdapat perbedaan realisasi.” Narasumber ketiga menambahkan, “Perubahan tersebut menyebabkan saldo awal atau saldo antar-laporan tidak sinkron, sehingga perlu dibuat penyesuaian melalui lembar kerja *Excel* agar laporan konsolidasi tetap akuntabel.”

3. Indikator *Economy* (Efisiensi Biaya)

- a. Bagaimana efisiensi biaya yang diperoleh BPKAD Kabupaten Brebes setelah mengimplementasikan aplikasi SIPD, apakah sudah memenuhi atau belum?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, “Memenuhi. Penggunaan SIPD efisien dan menghemat biaya karena dikembangkan pemerintah pusat (Kemendagri), sehingga BPKAD tidak perlu menganggarkan lisensi aplikasi atau jasa pengembang pihak ketiga.” Narasumber kedua menjelaskan, “Efisiensi terlihat dari tidak adanya biaya perawatan server lokal maupun pembelian software akuntansi khusus karena infrastruktur dikelola pusat, sehingga sudah memenuhi.”

Narasumber ketiga menambahkan, “Memenuhi. Kami tidak dibebani biaya lisensi dan hanya menggunakan komputer serta internet dinas yang tersedia untuk mengakses SIPD.”

- b. Apakah nilai manfaat yang dihasilkan oleh SIPD sebanding dengan sumber daya dan usaha yang dikeluarkan oleh daerah?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, “Sebanding untuk jangka panjang karena SIPD mendukung integrasi ‘Satu Data Indonesia’, meskipun saat ini masih membutuhkan usaha besar di daerah.”

Narasumber kedua menambahkan, “Sebanding, karena penghematan anggaran aplikasi dapat dialihkan untuk penataan dokumen dan penguatan koordinasi akuntansi antar-SKPD.” Narasumber ketiga berpendapat, “Sebanding, karena tidak ada pengeluaran tambahan selain biaya internet kantor.”

4. Indikator *Control* (Pengendalian dan Keamanan Sistem)

- a. Bagaimana mekanisme pembatasan hak akses dan keamanan akun pengguna dalam pengoperasian SIPD di BPKAD Brebes, apakah aspek pengendalian sudah memenuhi atau belum?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, “Sudah memenuhi. Karena pengendalian akses berjalan baik. Admin utama mengatur pembuatan akun, pembagian kewenangan, dan penonaktifan akun pegawai yang mutasi, sehingga akses sesuai tugas.” Narasumber kedua menambahkan, “Sudah memenuhi. Setiap pegawai memiliki akun dan *password* berbasis NIP dengan akses jurnal, posting, dan penyesuaian sesuai

peran, sehingga *audit trail* transaksi dapat dipertanggungjawabkan.”

Narasumber ketiga menjelaskan, “Memenuhi. Beberapa pegawai diberi akses khusus untuk menelusuri data seluruh SKPD, sehingga perubahan data pelaporan akhir dapat dibatasi, meskipun riwayat akses akun khusus belum tercatat secara spesifik.”

- b. Bagaimana sistem mengendalikan kesalahan input data atau transaksi, dan bagaimana prosedur melakukan koreksi atas data tersebut?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, “Sistem melarang pengeditan transaksi secara langsung setelah pembukuan, sehingga mendukung pengendalian internal dan mencegah manipulasi data.” Narasumber kedua menambahkan, “Kesalahan kode rekening atau nilai pada SKPD tidak dapat langsung diedit, tetapi harus melalui proses *unposting* oleh *user* BPKAD sebelum diperbaiki.” Narasumber ketiga menjelaskan, “Jika kesalahan sistem tidak dapat diselesaikan di daerah, bukti pendukung dikirimkan kepada Kemendagri untuk dilakukan koreksi pada pusat data.”

5. Indikator *Efficiency* (Efisiensi Proses)

- a. Sejauh mana penggunaan SIPD mampu menyederhanakan alur kerja dan mengurangi pekerjaan manual yang berulang, apakah sudah memenuhi atau belum?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, “Belum memenuhi. SIPD menyederhanakan alur kerja karena data antarbidang berada dalam satu *platform*, tetapi efisiensi belum optimal karena masih

diperlukan verifikasi manual.” Narasumber kedua menambahkan, “Belum memenuhi. Beberapa menu belum tersedia dan proses posting belum fleksibel karena transaksi harus diposting satu per satu. Saat *server down*, transaksi terkadang tidak tersimpan sehingga harus diposting ulang.” Narasumber ketiga mengatakan, “Belum sepenuhnya memenuhi. Karena pekerjaan berulang masih tinggi. Data harus diunduh ke *Excel*, beberapa rekapitulasi diketik ulang, dan saldo antar-SKPD dicocokkan secara manual karena keluaran sistem belum lengkap.”

- b. Apa saja proses manual yang masih terpaksa dilakukan di luar sistem SIPD dan mengapa hal tersebut harus dilakukan?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, “Pengolahan manual masih diperlukan untuk menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan menyesuaikan pos laporan yang belum terfasilitasi otomatis oleh SIPD.” Narasumber kedua mengatakan, “Kami masih membuat rekapitulasi kertas kerja di *Excel* untuk memetakan penyesuaian jurnal sebelum diinput kembali ke SIPD.” Narasumber ketiga menambahkan, “Laporan akhir masih perlu diolah dengan *Excel* karena cetakan SIPD belum menampilkan rincian pendukung yang memadai untuk pemeriksaan.”

6. Indikator *Service* (Pelayanan Sistem terhadap Pengguna)

- a. Bagaimana kualitas layanan, kemudahan antarmuka (interface), serta dukungan panduan/pelatihan yang diberikan untuk operasional SIPD, apakah sudah memenuhi atau belum?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, “Belum memenuhi. SIPD baik untuk standardisasi nasional, tetapi pelatihan bagi pegawai daerah masih terbatas dan sosialisasi pusat lebih banyak membahas kebijakan umum daripada teknis akuntansi.” Narasumber kedua menjelaskan, “Belum memenuhi. Antarmuka cukup jelas, tetapi pelatihan teknis kurang sehingga sebagian pegawai belajar secara mandiri (*otodidak*) melalui *manual book* atau diskusi saat menghadapi kendala.” Narasumber ketiga menambahkan, “Belum memenuhi. Panduan teknis modul pelaporan masih minim sehingga diperlukan bimbingan teknis (bimtek) yang intensif berbasis kasus nyata pelaporan daerah.”

- b. Bagaimana responsivitas bantuan teknis (*helpdesk*/layanan pengaduan) pusat saat daerah menghadapi kendala pada sistem SIPD?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, “Respons pusat membutuhkan alur birokrasi dan waktu cukup panjang karena melayani seluruh pemerintah daerah, terutama menjelang tenggat pelaporan.” Narasumber kedua mengatakan, “Penyelesaian masalah melalui *helpdesk* pusat masih lambat karena membutuhkan waktu, terutama untuk perbaikan *bug* pada basis data utama.” Narasumber ketiga berpendapat, “Responsivitas *helpdesk* perlu ditingkatkan. Sambil menunggu perbaikan pusat, kami membuat pencatatan internal agar penyusunan laporan tetap berjalan.”

Lampiran 2. Output Laporan Keuangan SIPD

 PEMERINTAHAN KABUPATEN BREBES BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025 1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025					
Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	2.557.381.442.185,42	2.589.183.786.876,92	(31.802.344.771,50)	(1,23)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	22.853.778.490,42	70.388.094.056,92	(48.334.323.566,50)	(68,67)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	850.138.877,52	2.284.080.935,83	(1.433.942.058,31)	(62,78)
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	850.138.877,52	2.284.080.935,83	(1.433.942.058,31)	(62,78)
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	1.537.448.099,90	57.615.452.134,09	(56.078.004.034,19)	(97,33)
7.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	1.537.448.099,90	57.615.452.134,09	(56.078.004.034,19)	(97,33)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	19.666.183.513,00	10.488.560.987,00	9.177.622.526,00	87,58
7.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	998.117.200,00	291.842.158,00	706.275.042,00	242,01
7.1.04.05	Jasa Gito-LO	2.024.923.217,00	1.984.015.484,00	40.907.733,00	2,06
7.1.04.07	Pendapatan Bunga-LO	5.925.381.723,00	3.268.984.075,00	2.656.397.648,00	81,26
7.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	18.800.000,00	87.450.000,00	(68.650.000,00)	(78,50)
7.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	209.668.892,00	900.647.201,00	(690.978.309,00)	(76,72)
7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	436.553.540,00	1.512.381,00	435.041.159,00	28.765,32
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	10.024.880.557,00	3.405.719.712,00	6.619.160.845,00	194,35
7.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	27.828.384,00	548.389.976,00	(520.561.592,00)	(94,92)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	22.853.778.490,42	70.388.094.056,92	(48.334.323.566,50)	(68,67)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	2.535.247.671.615,00	2.515.118.530.820,00	20.129.140.795,00	0,80
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.344.498.994.146,00	2.203.743.377.343,00	140.755.616.803,00	6,39
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	0,00	2.192.303.452.843,00	(2.192.303.452.843,00)	(100,00)
7.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	39.305.751.500,00	0,00	39.305.751.500,00	100,00
7.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.601.570.137.664,00	0,00	1.601.570.137.664,00	100,00
7.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	696.708.027.982,00	0,00	696.708.027.982,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan	2.337.583.917.146,00	2.192.303.452.843,00	145.280.464.303,00	6,63
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
7.2.01.06	Inentif Fiskal-LO	6.915.077.000,00	11.439.924.500,00	(4.524.847.500,00)	(39,55)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	6.915.077.000,00	11.439.924.500,00	(4.524.847.500,00)	(39,55)
7.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	190.748.677.469,00	311.375.153.477,00	(120.626.476.008,00)	(38,74)
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	174.226.749.273,00	255.925.866.307,00	(81.699.117.034,00)	(31,92)
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	16.521.928.196,00	55.449.287.170,00	(38.927.358.974,00)	(70,20)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	190.748.677.469,00	311.375.153.477,00	(120.626.476.008,00)	(38,74)
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	2.535.247.671.615,00	2.515.118.530.820,00	20.129.140.795,00	0,80
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	3.597.162.000,00	(3.597.162.000,00)	(100,00)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0,00	3.597.162.000,00	(3.597.162.000,00)	(100,00)
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	3.597.162.000,00	(3.597.162.000,00)	(100,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	3.597.162.000,00	(3.597.162.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.557.381.442.185,42	2.589.183.786.876,92	(31.802.344.771,50)	(1,23)
8	BERAN	289.925.728.926,00	273.636.845.154,51	16.288.883.771,49	5,95
8.1	BERAN OPERASI	65.858.365.016,00	63.362.174.274,51	1.688.190.741,49	2,66
8.1.01	Beban Pegawai	6.501.690.259,00	6.449.526.725,00	52.163.534,00	0,81
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.508.060.668,00	3.098.842.808,00	409.217.860,00	13,21
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.993.629.591,00	2.826.567.917,00	167.061.674,00	5,91
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	524.116.000,00	(524.116.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	57.331.799.839,00	56.722.453.388,33	609.346.450,67	1,07
8.1.02.01	Beban Barang	2.661.235.479,00	3.207.509.851,00	(546.274.372,00)	(17,03)
8.1.02.02	Beban Jasa	53.226.685.890,00	51.652.347.181,33	1.568.338.708,67	3,04
8.1.02.03	Beban Peneliharaan	359.312.084,00	436.381.752,00	(77.069.668,00)	(17,66)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.090.566.386,00	1.426.214.604,00	(335.648.218,00)	(23,53)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	1.216.874.918,00	190.194.161,18	1.026.680.756,82	539,81
8.1.07.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	19.183.208,00	14.496.881,75	4.686.326,25	32,33
8.1.07.03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.191.461.460,00	175.335.893,95	1.016.126.566,05	579,53
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	6.230.250,00	362.185,48	5.868.064,52	1.620,18
	JUMLAH BERAN OPERASI	65.858.365.016,00	63.362.174.274,51	1.688.190.741,49	2,66
8.1.08	BERAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.834.349.767,00	856.316.664,00	978.033.103,00	114,21

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.06.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	369.797.877,00	434.216.809,00	(64.508.932,00)	(14,86)
8.1.06.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	135.097.696,00	119.740.841,00	15.356.855,00	12,83
8.1.06.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.739.614,00	2.739.614,00	0,00	0,00
8.1.06.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemiraaan dengan Pihak Ketiga	951.065.180,00	0,00	951.065.180,00	100,00
8.1.06.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Bervajud	30.837.000,00	30.837.000,00	0,00	0,00
8.1.06.09	Beban Penyusutan Properti Investasi	344.962.400,00	268.782.400,00	76.120.000,00	28,32
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.834.349.767,00	856.316.664,00	978.033.103,00	114,21
8.3	BERAN TRANSFER	219.154.113.811,00	209.092.460.178,00	10.061.653.633,00	4,81
8.3.01	Beban Bagi Hasil	23.558.205.559,00	15.927.582.056,00	7.630.623.503,00	47,81
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	21.294.412.062,00	14.627.325.212,00	6.667.086.850,00	45,38
8.3.01.02	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.263.793.497,00	1.300.256.844,00	963.536.653,00	74,10
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	195.595.908.252,00	193.164.878.122,00	2.431.030.130,00	1,26
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	195.595.908.252,00	193.164.878.122,00	2.431.030.130,00	1,26
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	219.154.113.811,00	209.092.460.178,00	10.061.653.633,00	4,81
8.2	BERAN TIDAK TERDUGA	3.886.900.332,00	325.894.038,00	3.561.006.294,00	1.092,69
8.2.01	Beban Tidak Terduga	3.886.900.332,00	325.894.038,00	3.561.006.294,00	1.092,69
8.2.01.01	Beban Tidak Terduga	3.886.900.332,00	325.894.038,00	3.561.006.294,00	1.092,69
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	3.886.900.332,00	325.894.038,00	3.561.006.294,00	1.092,69
	JUMLAH BEBAN	289.925.728.926,00	273.636.845.154,51	16.288.883.771,49	5,85
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	2.267.375.713.179,42	2.315.466.941.722,41	(48.091.228.542,99)	(2,08)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	69.388.378,00	11.735.536.316,83	(11.666.147.938,83)	(99,41)
7.4.01	Surplus Penjualan/Pelepasan/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	11.341.915.242,00	(11.341.915.242,00)	(100,00)
7.4.01.01	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	114.845.242,00	(114.845.242,00)	(100,00)
7.4.01.03	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	0,00	11.227.070.000,00	(11.227.070.000,00)	(100,00)
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	69.388.378,00	393.621.074,83	(324.232.696,83)	(82,37)
7.4.03.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	69.388.378,00	393.621.074,83	(324.232.696,83)	(82,37)
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	69.388.378,00	11.735.536.316,83	(11.666.147.938,83)	(99,41)
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	248.303.939,00	(248.303.939,00)	(100,00)
8.4.01	Defisit Penjualan/Pelepasan/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	134.600.400,00	(134.600.400,00)	(100,00)
8.4.01.01	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	134.600.400,00	(134.600.400,00)	(100,00)
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	113.703.539,00	(113.703.539,00)	(100,00)
8.4.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	113.703.539,00	(113.703.539,00)	(100,00)
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	248.303.939,00	(248.303.939,00)	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	69.388.378,00	11.487.232.377,83	(11.417.843.999,83)	(99,40)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	2.267.445.101.557,42	2.326.954.174.100,24	(59.509.072.542,82)	(2,56)
	POS LUAR BIASA				
8.5	BERAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	2.267.445.101.557,42	2.326.954.174.100,24	(59.509.072.542,82)	(2,56)

Kab. Brebes, 21 Juli 2026
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Drs. EDY KUSMARTONO, M.Si
NIP.19680616199091001

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Lampiran 4. Buku Bimbingan Tugas Akhir

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING I

Nama : Fadia Gaffra Inzhaki
 NIM : 23032059
 Program Studi : D3 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes
 Pembimbing I : Astofi Langaeng N., S.Pd., M.Si., Ak., B.KP

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1.	8 Des 2025	- Pengajuan Judul	JM
2.	17 Des 2025	- ACC Judul	JM
3.	1 April 2026	- Bimbingan Proposal Bab 1-3	JM
4.	9 Juni 2026	- Bimbingan Proposal 2	JM
5.	12 Juni 2026	- Bimbingan Proposal 3	JM
6.	22 Juni 2026	- Bimbingan Proposal 4	JM
7.	25 Juni 2026	- ACC Proposal	JM
8.	7. Juli 2026	- Bimbingan Tugas Akhir	JM
9.	13 Juli 2026	- Revisi Tugas Akhir	JM
10.	17 Juli 2026	Acc TA	JM

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING II

Nama : Fadia Gaffra Inzhaki
 NIM : 23030059
 Program Studi : D3 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
 Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes
 Pembimbing II : Fitri Amaliyah, SE, M.Ak, Ak

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1.	18 Des 2025	- Pengajuan Judul	
2.	18 Des 2025	- Acc Judul	
3.	2 Apr 2026	- Bimbingan Proposal 1	
4.	16 Apr 2026	- Bimbingan Proposal 2	
5.	4 Mei 2026	- Bimbingan proposal 3	
6.	20 Mei 2026	- Bimbingan Proposal 4	
7.	5 Juni 2026	- Bimbingan proposal 5	
8.	8 Juni 2026	- ACC proposal	
9.	10 Juli 2026	- Bimbingan Tugas Akhir	
10.	15 Juli 2026	- Revisi Tugas Akhir	
11.	16 Juli 2026	- Revisi Tugas Akhir	
12.	17 Juli 2026	Acc Tugas Akhir	